

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM

Tanggal Pembuatan : Juli 2023

Tanggal Efektif : Juli 2023

Tanggal Pengesahan : Yuli 2023

Tanggal Pengesahan : Yuli 2023

Disahkar Olera : Kepala BPIU2K Karangasem

Wandy Tri Prabowo, S.Pi, M.Sc.

VIP. 19811209 200604 1 002

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana **Dasar Hukum** 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan 3. Mempunyai communication skill 4. Kemampuan Pendokumentasian Informasi dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 1. Komputer, Laptop, ATK 2. SOP Penngelolaan Permohonan Informasi 2. Jaringan Internet 3. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Buku Tamu/Agenda

2. Daftar Pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian/ PPID Unit Kerja Eselon	Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Atasan PPID Kementerian/ PPID Unit Kerja Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi KKP				dokumen informasi publik, peraturan perUUan	3 hari	konsep kajian	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP		-		konsep kajian	1 hari	rekomenda si	
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup	dito	lak		dokumen informasi publik, peraturan perUUan	1 hari	surat penolakan	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID		diterima	1	Konsep SK	14 hari	Konsep Keputusan Atasan PPID/PPID	Dapat berupa Keputusan PPID
4	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan				Konsep SK	1 hari	Keputusan Atasan PPID	